

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: KOMPETENSI SDM, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

FACTORS THAT INFLUENCE THE QUALITY OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS: HR COMPETENCY, GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, AND REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS

Sutri Handayani^{1*}, Isnaini Anniswati Rosyida², Ana Fitriyatul Bilgies³

¹ Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan,
Email : sutrihandayani@unisda.ac.id

² Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan,
Email : isnaini@unisda.ac.id

³ Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan,
Email : anafitriyatulbilgies@unisda.ac.id

*email Koresponden: sutrihandayani@unisda.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.445>

Submitted: 02/01/25

Article info:
Accepted: 15/01/25

Published: 30/01/25

Abstract

This research aims to examine the factors that influence the quality of regional government financial reports: human resources competency, government accounting standards, and regional financial accounting systems (empirical study of the Lamongan Regency Government and Bojonegoro Regency Government). This research was conducted in Lamongan and Bojonegoro involving 40 employees of BPKAD Lamongan and BPPKAD Bojonegoro as respondents. This quantitative research uses multiple linear regression. This technique is processed with SPSS 25 to analyze several hypotheses. The intercorrelation model between the three variables in this research reveals that human resource competency, implementation of government accounting standards and implementation of regional financial accounting systems have a significant correlation with the quality of regional government financial reports.

Keywords : Human Resources Competency, SAP Implementation, SAKD Implementation, LKPD Quality

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: kompetensi sdm, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah (Studi empiris pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro). Penelitian ini dilakukan di Lamongan dan Bojonegoro yang melibatkan 40 pegawai BPKAD Lamongan

dan BPPKAD Bojonegoro sebagai responden. Penelitian kuantitatif ini menggunakan regresi linier berganda, Teknik tersebut diolah dengan SPSS 25 untuk menganalisis beberapa hipotesis. Model interkolerasi antara tiga variabel dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki korelasi yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP, Penerapan SAKD, Kualitas LKPD

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah harus sistematis, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan manajemen yang bersih. Salah satu Upaya penerapan manajemen yang bersih adalah pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan ini minimal menyajikan laporan kinerja anggaran neraca, laporan arus kas dan lampiran laporan keuangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, salah satunya adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang memiliki dampak langsung terhadap kinerjanya. Dengan adanya pengalaman, pengetahuan dan hasil kerja yang dihasilkan oleh SDM tersebut akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin kompeten SDM, semakin tinggi kualitas LKPD yang dihasilkan pemerintah (Wijayanti, 2017).

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, maka standar akuntansi pemerintah ini merupakan persyaratan yang harus dimiliki sebagai penegak hukum berupaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Terdapat pengaruh antara standar akuntansi pemerintah pada kualitas laporan keuangan, SAP diterapkan dilingkungan pemerintah pusat maupun daerah, sehingga penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah (Syaifullah, M., 2015).

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebuah tahapan untuk mengumpulkan data, mencatat, mengiktisar dan melaporkan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah secara manual atau dengan komputerisasi. SAKD mempengaruhi penyusunan laporan keuangan secara terstruktur seperti proses klasifikasi, pencatatan dan pelaporan. SAKD yang berkualitas dapat mengoptimalkan kualitas laporan keuangan (Susanto, A., & Meiryani, 2018).

Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah menjadi faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimana apabila kualitas laporan keuangan telah terpenuhi maka pemerintahan yang baik akan dapat tercapai (Trigo, A., Belfo, F., & Estébanez, R. P., 2016).

Penelitian Terdahulu

Kualitas laporan keuangan dideterminasi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu, Kompetensi Sumber Daya Manusia (Siti Irafah, 2020), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Suprihatin & Ananthi, 2019), dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Defitri, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut, menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (Hoesada, 2020), Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan (Sudarno, 2019) dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Aprisyah & Yuliati, 2021) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Stewardship Theory

Teori stewardship merupakan gambaran pihak manajemen yang termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi daripada mengutamakan kepentingan sendiri. Teori ini bisa di implementasikan dibidang akuntansi instansi sektor public seperti instansi pemerintahan dan instansi non provit, dimana instansi-instansi ini dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak steward dan principal.

Dalam hal ini teori stewardship digunakan sebagai penjelas pemerintah daerah selaku instansi yang dapat dipercaya, penampung aspirasi publik, pemberi pelayanan bagi Masyarakat dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana public, oleh karena itu pihak pemerintah daerah harus transparan dalam pengelolaan dan penggunaan dana APBN.

Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu cara pengelolaan sumber daya manusia pada suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara optimal melalui pengembangan sumber daya manusia sendiri. Pengelolaan sumber daya manusia pada organisasi pada dasarnya adalah kegiatan suatu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia dimulai dengan rekrutmen. Analisa jabatan untuk menentukan posisi dan tanggung jawab yang sesuai, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi serta pembaharuan yang berhubungan dengan pension dan pemutusan hubungan kerja.

Dalam hal ini teori manajemen sumber daya manusia digunakan sebagai peran tenaga kerja yang memungkinkan sumber daya manusia berkontribusi secara efektif dan efisien untuk tujuan organisasi, manajemen sumber daya manusia menjadi teori yang relatif baru dalam pengelolaan manusia di organisasi manapun. Manusia dianggap sebagai sumber utama dalam teori ini artinya mengacu pada dimensi manusia dalam mengelola organisasi. Karena organisasi merupakan sekelompok orang dengan tujuan penting seperti pengelolaan, pengembangan keterampilan, motivasi untuk kinerja yang lebih tinggi serta menghormati komitmen.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan ciri-ciri kepribadian yang secara langsung mempengaruhi kinerjanya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, satuan kerja perangkat daerah harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, didukung dengan pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman di bidang keuangan, hal ini diperlukan untuk mengimplementasikan sistem akuntansi yang ada.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan adalah pedoman dan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Diterapkan dalam administrasi negara dan departemen maupun daerah dan dinas-dinasnya. Sistem akuntansi pemerintah berguna untuk penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang akan diberikan kepada pihak diluar instansi (Sulasmining, & Alliyah, S., 2023).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berkaitan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk keputusan ekonomi. Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki tugas tanggung jawab, manajerial, hingga pengawasan pada bagian administrasi. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, apabila laporan keuangan dicatat dengan baik yang artinya memberikan informasi keuangan yang lengkap,

cermat, sesuai dengan pedoman dan dalam bentuk serta waktu yang tepat, maka kualitas laporan keuangan akan memperoleh karakteristik yang ditetapkan, karena sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan maka akan sulit untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan merupakan karakteristik kualitas yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan bermanfaat bagi para pemakai untuk mengambil keputusan. Relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami adalah kriteria dan unsur-unsur yang menentukan kualitas laporan keuangan serta membuat informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah berharga atau berguna. Keempat karakteristik tersebut merupakan persyaratan normatif yang mutlak agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Kantor BPKAD Kabupaten Lamongan dan BPPKAD Kabupaten Bojonegoro, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengambil responden yaitu pegawai BPKAD Kabupaten Lamongan dan BPPKAD Kabupaten Bojonegoro. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan nonprobability sampling.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 1. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi SDM	40	23	30	25.15	2.143
SAP	40	109	140	120.70	9.045
SAKD	40	28	40	33.60	3.558
Kualitas Lap Keuangan	40	88	120	101.15	9.818
Valid N (listwise)	40				

Sumber:
diolah

Data Primer
SPSS 25 (2024)

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) memiliki nilai minimum 23, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 30 dengan nilai rata-rata sebesar 25,15 dan standar deviasinya sebesar 2,143. Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 109, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 140 dengan nilai rata-rata sebesar 120,70 dan standar deviasinya sebesar 9,045. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) memiliki nilai minimum sebesar 28, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 40 dengan nilai rata-rata 33,60 dan standar deviasinya sebesar 3,558. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) memiliki nilai minimum sebesar 88, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 120 dengan nilai rata-rata sebesar 101,15 dan standar deviasinya sebesar 9,818.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁)	X _{1.1}	0,524	0,312	Valid
	X _{1.2}	0,777	0,312	Valid
	X _{1.3}	0,778	0,312	Valid
	X _{1.4}	0,782	0,312	Valid
	X _{1.5}	0,733	0,312	Valid
	X _{1.6}	0,830	0,312	Valid
Standar Akuntansi Pemerintahan (X₂)	X _{2.1}	0,538	0,312	Valid
	X _{2.2}	0,596	0,312	Valid
	X _{2.3}	0,729	0,312	Valid
	X _{2.4}	0,663	0,312	Valid
	X _{2.5}	0,698	0,312	Valid
	X _{2.6}	0,410	0,312	Valid
	X _{2.7}	0,647	0,312	Valid
	X _{2.8}	0,726	0,312	Valid
	X _{2.9}	0,810	0,312	Valid
	X _{2.10}	0,719	0,312	Valid
	X _{2.11}	0,567	0,312	Valid
	X _{2.12}	0,526	0,312	Valid
	X _{2.13}	0,516	0,312	Valid
	X _{2.14}	0,688	0,312	Valid
	X _{2.15}	0,634	0,312	Valid
	X _{2.16}	0,609	0,312	Valid
	X _{2.17}	0,330	0,312	Valid
	X _{2.18}	0,631	0,312	Valid
	X _{2.19}	0,763	0,312	Valid
	X _{2.20}	0,740	0,312	Valid
	X _{2.21}	0,733	0,312	Valid

	X _{2.22}	0,520	0,312	Valid
	X _{2.23}	0,802	0,312	Valid
	X _{2.24}	0,563	0,312	Valid
	X _{2.25}	0,376	0,312	Valid
	X _{2.26}	0,802	0,312	Valid
	X _{2.27}	0,408	0,312	Valid
	X _{2.28}	0,621	0,312	Valid
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₃)	X _{3.1}	0,548	0,312	Valid
	X _{3.2}	0,696	0,312	Valid
	X _{3.3}	0,842	0,312	Valid
	X _{3.4}	0,849	0,312	Valid
	X _{3.5}	0,843	0,312	Valid
	X _{3.6}	0,875	0,312	Valid
	X _{3.7}	0,715	0,312	Valid
	X _{3.8}	0,727	0,312	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y ₁	0,670	0,312	Valid
	Y ₂	0,779	0,312	Valid
	Y ₃	0,717	0,312	Valid
	Y ₄	0,863	0,312	Valid
	Y ₅	0,809	0,312	Valid
	Y ₆	0,872	0,312	Valid
	Y ₇	0,790	0,312	Valid
	Y ₈	0,776	0,312	Valid

Sumber: Data Primer diolah SPSS 25 (2024)

Kompetensi sumber daya manusia atau variabel X₁ dinyatakan **valid** karena $r_{hitung} > r_{tabel}$, dengan demikian ke-6 item pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai instrument penelitian. Standar akuntansi pemerintahan atau variabel X₂ dinyatakan **valid** karena $r_{hitung} > r_{tabel}$, dengan demikian ke-28 pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai instrument penelitian. Sistem akuntansi keuangan daerah atau variabel X₃ dinyatakan **valid** karena $r_{hitung} > r_{tabel}$, dengan demikian ke-8 pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai instrument penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Cronbach Alpha	Keterangan
X ₁ : Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,775	0,70	Reliabel
X ₂ : Standar Akuntansi Pemerintahan	0,751	0,70	Reliabel
X ₃ : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,784	0,70	Reliabel
Y: Kualitas Laporan Keuangan	0,777	0,70	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah SPSS 25 (2024)

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁) dengan nilai alpha 0,775 > 0,70. Jadi variabel tersebut terbukti reliabel. Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X₂) dengan nilai alpha 0,751 > 0,70. Jadi variabel tersebut terbukti reliabel. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₃) dengan nilai alpha 0,784 > 0,70. Jadi variabel tersebut terbukti reliabel. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) dengan nilai alpha 0,777 > 0,70. Jadi variabel tersebut terbukti reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. One-Sample Kolmogroy-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,07628787
Most Extreme Differences	Absolute	0,097
	Positive	0,074
	Negative	-0,097
Test Statistic		0,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Sumber: diolah SPSS 25 (2024)

Besarnya nilai test Statistic Kolmogorov-Smirnov adalah 0,097 dan signifikan pada 0,200 dan lebih dari 0,05 (0,200 > 0,05) yang berarti dapat disimpulkan kalau data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a				
Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,939		
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,005	0,466	2,145
	Standar Akuntansi Pemerintahan	0,353	0,347	2,885
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,000	0,315	3,171

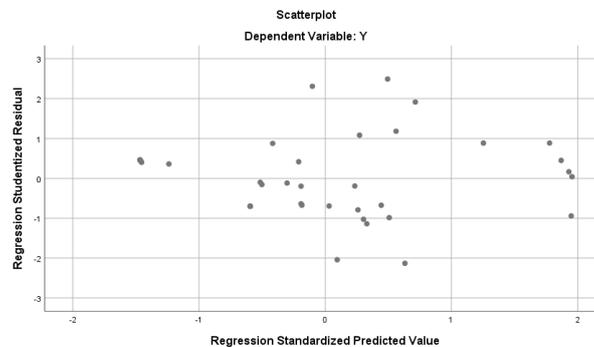
Sumber: Data Primer diolah SPSS 25 (2024)

Variabel independent yaitu kompetensi sumber daya manusia mempunyai tolerance > 0,10 yaitu sebesar 0,466 dan nilai VIF yaitu 2,145, variabel standar akuntansi pemerintahan mempunyai tolerance > 0,10 yaitu 0,347 dan nilai VIF yaitu 2,885, dan variabel sistem

akuntansi keuangan daerah mempunyai tolerance $> 0,10$ yaitu sebesar 0,315 dan nilai VIF yaitu 3,171. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi ini tidak terjadi multikolinieritas dan penelitian ini dapat dikatakan ideal.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil output 25(2024)

IBM diolah SPSS

Dapat di atas bahwa

dilihat dari gambar titik-titik pada

scatterplot tidak membentuk pola yang teratur, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Asumsi klasik dalam model ini terpenuhi yaitu terbebas dari heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	0,383	4,936		0,078
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,702	0,235	0,153	2,987
	Standar Akuntansi Pemerintahan	0,061	0,065	0,056	0,940
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	2,255	0,172	0,817	13,101

Sumber: Data Primer diolah SPSS 25 (2024)

Hasil persamaan regresi linier berganda di atas dapat memberikan penjelasan bahwa: 1) Nilai konstanta (α) sebesar 0,383 merupakan keadaan saat variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) belum terpengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2) dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3). Jika variabel independent tidak ada maka variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) tidak mengalami perubahan. 2) Nilai koefisien regresi Kompetensi SDM (β_1) sebesar 0,702 menunjukkan bahwa variabel Kompetensi SDM mempunyai pengaruh positif terhadap Kualitas LKPD yang berarti bahwa Kompetensi SDM yang baik dapat memberikan perubahan Kualitas LKPD dalam setiap penyusunan LKPD hal ini juga dapat dibuktikan dengan data dimana setiap kenaikan satuan variabel Kompetensi SDM maka akan mempengaruhi Kualitas LKPD sebesar 0,702 dengan asumsi variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. 3) Nilai koefisien regresi Standar Akuntansi Pemerintahan (β_2) sebesar 0,061 menunjukkan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai

pengaruh positif terhadap Kualitas LKPD yang berarti bahwa penerapan SAP yang baik akan memberikan perubahan yang baik pula terhadap penyusunan LKPD hal ini juga dibuktikan dengan data dimana setiap kenaikan satuan variabel Penerapan SAP akan mempengaruhi Kualitas LKPD sebesar 0,061 dengan asumsi variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. 4) Nilai koefisien regresi Penerapan SAK Daerah (β_3) sebesar 2,255 menunjukkan bahwa variabel Penerapan SAK Daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kualitas LKPD yang berarti bahwa penerapan SAK yang baik akan memberikan perubahan yang baik pula terhadap penyusunan LKPD hal ini juga dibuktikan dengan data dimana setiap kenaikan satuan variabel Penerapan SAK Daerah akan mempengaruhi Kualitas LKPD sebesar 2,255 dengan asumsi variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji t

Dapat diinterpretasikan hasil uji t dengan nilai t_{hitung} pada variabel Kompetensi SDM (X_1) lebih besar dari t_{tabel} ($7,419 > 1,688$), dan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari taraf sebesar 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian nilai ini memberikan makna bahwa secara parsial variabel Kompetensi SDM mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Lamongan dan BPPKAD Kabupaten Bojonegoro.

Nilai t_{hitung} pada Penerapan SAP (X_2) lebih besar dari t_{tabel} ($8,424 > 1,688$), dan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari taraf sebesar 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian nilai ini memberikan makna bahwa secara parsial variabel Penerapan SAP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Lamongan dan BPPKAD Kabupaten Bojonegoro.

Nilai t_{hitung} pada Penerapan SAKD (X_3) lebih besar dari t_{tabel} ($24,628 > 1,688$), dan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari taraf sebesar 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian nilai ini memberikan makna bahwa secara parsial variabel Penerapan SAKD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Lamongan dan BPPKAD Kabupaten Bojonegoro.

Uji F (Simultan)

Hasil uji F atau ANOVA diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 259,632. Jika dibandingkan dengan F_{tabel} maka F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($259,632 > 2,87$) dan tingkat signifikansi kurang dari taraf nyata ($0,000 < 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Penerapan SAKD secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.978 ^a	.956	.952	2.148

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber:
Data Primer

diolah SPSS 25 (2024)

Tabel diatas menunjukkan besarnya R Square adalah 0,956 dapat diartikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dideskripsikan oleh variabel-variabel bebas atau variabel-variabel independent yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan nilai sebesar 9,52% sedangkan sisanya ($100\% - 9,52\% = 90,48\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 1) Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial memberikan pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, Kompetensi SDM meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ada di Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat merubah Kualitas LKPD menjadi lebih baik dalam penyusunan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro jika Kompetensi SDM lebih diperhatikan dan ditingkatkan. 2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena semua transaksi yang dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 3) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya dalam proses penyusunan LKPD Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro, orang-orang yang terlibat harus benar-benar memahami SAK Daerah yang dijalankan instansi dalam penyusunan laporan keuangan. Semakin tinggi pemahaman SAK Daerah dalam penyusunan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka semakin baik pula LKPD yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi-dimensi dari sistem akuntansi keuangan daerah telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 4) Dalam pengujian secara bersama-sama (simultan), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Artinya dalam setiap penyusunan LKPD, kompetensi SDM meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik dan disertai dengan pemahaman tentang Penerapan SAP dan Penerapan SAK Daerah dapat menciptakan Kualitas LKPD yang baik dalam setiap penyusunan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro.

Dengan hasil ini peneliti sadar beberapa poin penting yang dapat menjadi acuan untuk kedepannya: 1) Bagi instansi: Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan agar laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dapat lebih berkualitas. 2) Bagi peneliti selanjutnya: Peneliti selanjutnya hendaknya meneliti variabel lain yang dapat menyebabkan Kualitas LKPD lebih berkualitas atau tidak berkualitas agar dapat menjadi rujukan dan pembandingan antar variabel yang dapat mempengaruhi Kualitas LKPD. Peneliti selanjutnya hendaknya meneliti di objek yang berbeda sehingga dapat menjadi rujukan terbaru dari objek yang diteliti. Peneliti selanjutnya hendaknya meneliti dengan penambahan sampel agar dapat menjadi rujukan terbaru dari sampel yang diteliti.

5. DAFTAR PUSTAKA

Aprisyah, P., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan

- Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2), 1855–1869.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Hoesada, R. D. dan J. (2020). The Effect Of Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Competence Of Human Resources, And Use Of Information Technology On Quality Of Financial Statements. *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS)*, 7(1). www.ijiras.com
- Siti Irafah, E. N. S. dan M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Journal Research Of Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Aku Accounting*, 8(2), 337–348. <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.16>
- Sudarno, A. F. E. dan. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(59), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sulasmining, & Alliyah, S. (2023). The Effect of Internal Control, Human Resources and Utilization of Accounting Information Technology on the Quality of Financial Statements of Savings and Loans Cooperatives in Rembang Regency. *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 153–163. <http://journal.al-matani.com/index.php/invest/index>
- Suprihatin, N. S., & Ananthi, A. A. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 242. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i2.6218>
- Susanto, A., & Meiryani. (2018). The influence of business process and risk management on the quality of accounting information systems. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 96(9), 2626–2637.
- Syaifullah, M. (2015). Influence Business Process On The Quality Of Accounting Information System. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 4(12). Taib, A., Awang, Y., Shuhidan, S. M., Zakaria, Z. N. Z., Sulistyowati, S., & Ifada, L. M. (2023). Digitalization of the accounting profession: An assessment of digital competencies in a Malaysian comprehensive university. *Asian Journal of University Education*, 19(2), 365–380. <https://doi.org/10.24191/ajue.v19i2.22229>
- Trigo, A., Belfo, F., & Estébanez, R. P. (2016). Accounting Information Systems: Evolving towards a Business Process Oriented Accounting. *Procedia Computer Science*, 100, 987–994. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.09.264>
- Wijayanti, R. 2017. Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(3): 1-18.